

BAB I

PENDAHULUAN

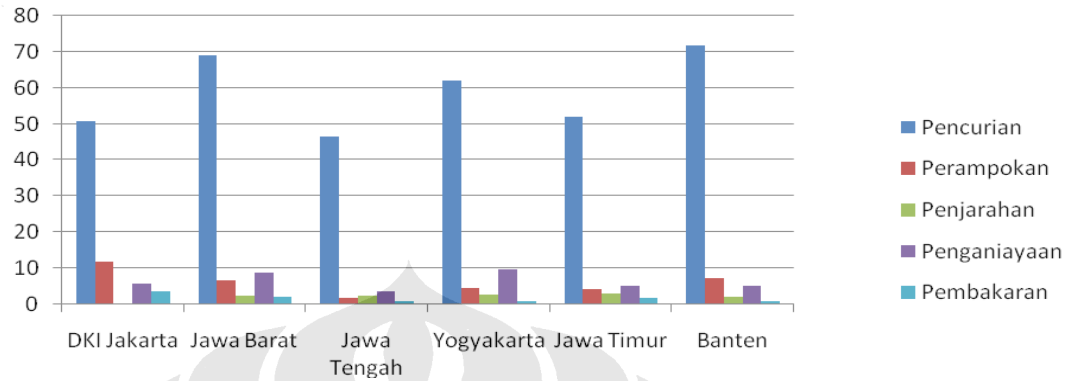
1.1. Latar Belakang

Jawa merupakan sebuah tempat yang sangat vital bagi Indonesia terutama dari sisi perekonomian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Jawa merupakan daerah tujuan utama dan tempat transit yang paling sering digunakan oleh warga negara asing untuk memasuki Indonesia. Pandangan pihak luar terhadap Indonesia, yang akan mempengaruhi perdagangan internasional dan nilai tukar valuta asing, didominasi oleh keadaan dan kejadian di Jawa. Kedua, sebagian besar aktivitas ekonomi, kantor pusat perusahaan, dan instrumen pembiayaan (pasar modal, perbankan, dll) berada di Jawa. Oleh karenanya, bagi perusahaan-perusahaan besar, keputusan manajerial untuk operasi dan pembiayaan aktivitas ekonomi dilakukan di Jawa. Ketiga, Jawa merupakan daerah dengan bagian penduduk Indonesia terbesar sehingga kondisi yang terjadi di Jawa merupakan representasi kondisi sebagian besar penduduk Indonesia.

Namun, penduduk Indonesia yang besar di Jawa juga menyebabkan berbagai masalah sosial. Tingkat kejahatan yang tinggi merupakan salah satunya. Pada tahun 2005, empat provinsi di Jawa memiliki tingkat kejahatan properti yang relatif tinggi (lebih dari 50 persen) yaitu Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan Jakarta.¹

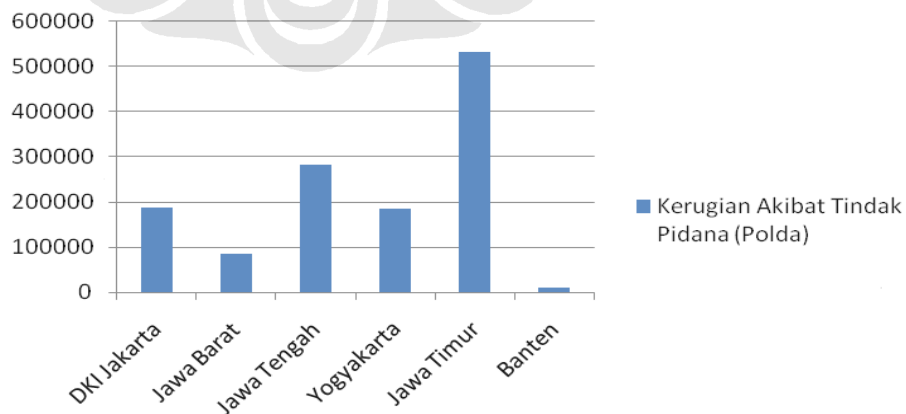
Tingkat kejahatan yang tinggi tersebut telah menyebabkan kerugian yang tidak sedikit. Berdasarkan kasus kejahatan yang dilaporkan di Jawa pada tahun 2004, jumlah kerugian bagi korban kejahatan berupa kehilangan dan kerusakan properti adalah sebesar 1,3 trilyun rupiah. Padahal, sebagian besar biaya dari tindak kejahatan tidak dapat terkuantifisir dengan baik. Pemilihan daerah tempat tinggal dan atau usaha karena tingkat kejahatan di suatu daerah merupakan salah satunya.

¹ BPS, 2005. Laporan Statistik Kriminal 2005. Jakarta: BPS, hal.14.

Gambar 1-1:**Persentase Desa Terkena Tindak Kejahatan Menurut Provinsi**

Sumber: Diolah dari Podes ST 2003

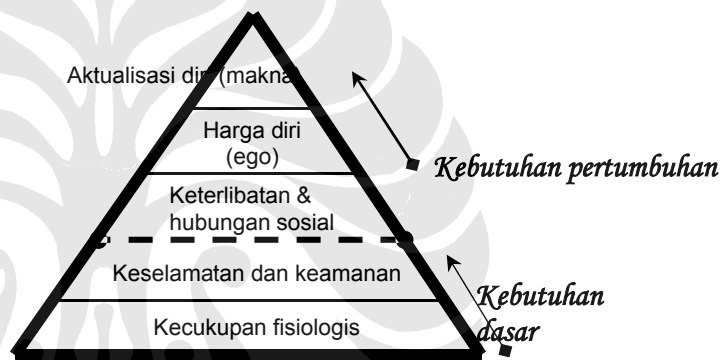
Berdasarkan penelitian Cullen dan Levit (1999), peningkatan kejahatan di daerah perkotaan sebesar 10 persen akan menurunkan populasi kota sebesar 1 persen, dengan rumah tangga berpendidikan tinggi dan rumah tangga memiliki anak yang paling sensitif terhadap peningkatan kejahatan tersebut. Perginya rumah tangga berpendidikan tinggi, yang memiliki kemampuan untuk menyebarkan eksternalitas positif, akan menyebabkan hilangnya potensi eksternalitas positif bagi kota tersebut. Sebuah kerugian dari tindak kejahatan yang tidak dapat terkuantifisir dengan baik.

Gambar 1-2:**Kerugian Akibat Tindak Pidana (Jutaan rupiah)**

Sumber: Mabes Polri, Evaluasi Situasi Kamtibmas 2003-2004

Selain itu secara psikologis, tingginya angka kejahatan juga mempengaruhi kondisi psikologis penghuni sebuah daerah. Maslow (1954) telah menggambarkan tingkatan kebutuhan manusia melalui piramida hierarki kebutuhan. Sisi dasar piramida kebutuhan tersebut adalah kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan fisiologis manusia dan kebutuhan akan keselamatan dan keamanan. Di atasnya berturut-turut adalah kebutuhan akan afiliasi sosial, pengakuan diri, dan (yang tertinggi) kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri.

Gambar 1-3
Piramida Maslow



Dari piramida kebutuhan tersebut dapat dilihat bahwa salah satu kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi adalah keselamatan dan keamanan. Tanpa pemenuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan-kebutuhan lainnya tidak dapat terpenuhi dengan baik. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan terhadap keselamatan dan keamanan adalah tindak kejahatan.

Relatif tingginya tingkat kejahatan di Jawa akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan akan keamanan dan keselamatan. Hal ini bisa menyebabkan sebagian besar penduduk Jawa tidak dapat memenuhi kebutuhan lainnya (afiliasi sosial, pengakuan diri, dan aktualisasi) yang menyebabkan potensi diri terbatas dan tingkat utilitas warga menurun.

Oleh karena itu, permasalahan kejahatan di Jawa harus diselesaikan dengan baik melalui kebijakan publik dan swasta yang ada. Sayangnya selama ini, sebagian besar masalah kejahatan properti hanya dianalisis dan diselesaikan melalui pendekatan hukum, kriminologi, dan ilmu kepolisian. Penggunaan metode ilmiah, berbasis ilmu ekonomi, untuk menganalisa masalah kejahatan hampir tidak pernah digunakan, terutama di Indonesia. Menurut Becker (1968) hal ini mungkin disebabkan karena dominannya pandangan bahwa aktivitas ilegal terlalu imoral untuk dianalisis menggunakan metode ilmiah.

Akibatnya, kebijakan-kebijakan publik yang diambil untuk menekan tingkat kejahatan properti sebagian besar dilakukan melalui pendekatan hukum dan kepolisian. Kebijakan ini didominasi dengan penanggulangan kasus kejahatan properti. Kasus kejahatan ditanggulangi untuk mengisolir pelaku kejahatan dari masyarakat dengan menemukannya di penjara (*incapacitation effect*). Diharapkan dengan dipenjaranya pelaku kejahatan, calon pelaku kejahatan lainnya akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak kejahatan (*deterrence effect*).²

Padahal, analisis kejahatan properti dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi kejahatan. Penelitian Morgan Kelly (2000) menunjukkan bahwa kejahatan properti didominasi oleh motif ekonomi yang ditandai dengan signifikannya variabel-variabel seperti kemiskinan, pengangguran, struktur keluarga, populasi, ras, dan aktivitas polisi. Pendekatan ekonomi juga dapat dilihat dari rasionalitas pelaku kejahatan yang lebih memilih melakukan aksinya di daerah perkotaan. Secara teori hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: lebih tingginya keuntungan aksi kejahatan (harta benda korban kejahatan) di kota daripada desa, kecilnya probabilitas tertangkap (kecilnya *expected cost* bagi penjahat) di kota akibat tingginya kepadatan penduduk, dan menariknya kota terhadap tindak kejahatan individu.³

² Steven D. Levitt, *Understanding Why Crime Fell in the 1990s: Four Factors That Explain the decline and Six That Do Not* [The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 1. (2004)], pp. 163-190.

³ Edward L. Glaeser dan Bruce Sacerdote, *Why Is There More Crime in Cities?* [The Journal of Political Economy, Vol. 107, No. 6, Part 2: Symposium on the Economic Analysis of Social Behavior in Honor of ary S. Becker. (Dec., 1999)], pp. S225-S258.

Pemilihan daerah perkotaan sebagai lokasi untuk melakukan tindakan kejahatan, dapat dianalogikan dengan pemilihan instrumen investasi oleh investor. Keputusan memilih tempat investasi oleh investor, selalu mempertimbangkan dua faktor yaitu: tingkat pengembalian dan resiko dari tempat investasi tersebut. Di mana investor normal selalu menginginkan tingkat pengembalian yang besar dengan resiko yang rendah. Apabila melakukan tindak kejahatan di daerah kota atau desa merupakan sebuah pilihan instrumen investasi maka yang akan dipilih adalah tindak kejahatan properti di perkotaan.

Hal ini disebabkan, perkotaan merupakan lokasi terbaik bagi tindak kejahatan karena memberikan tingkat pengembalian (harta benda korban) yang relatif lebih besar dengan resiko (probabilita tertangkap) yang relatif rendah akibat tingginya kepadatan penduduk. Dengan kata lain, penjahat melakukan pendekatan rasional (menghitung keuntungan dan biaya, serta merespon insentif) dalam melakukan aksinya di kota. Penelitian yang ada pun mengungkapkan bahwa elastisitas dari kejahatan terhadap ukuran kota sebesar 0,15. Peningkatan populasi sebesar 10 persen akan meningkatkan tingkat kejahatan properti sebesar 1,5 persen (Glaeser, Sacerdote, dan Scheinkman, 1996).⁴

Dari situ dapat dilihat bahwa pendekatan ekonomi untuk menganalisa kejahatan dimulai dengan asumsi dasar bahwa pelaku kejahatan melakukan aksinya dengan rasional: merespon insentif dengan melakukan perhitungan untung dan rugi (Sullivan, 2003). Oleh karenanya, tipe kejahatan yang cocok untuk dianalisa melalui pendekatan ekonomi adalah kejahatan properti.

Untuk meminimumkan kejahatan properti, insentif tindak kejahatan properti harus diperkecil dengan memperbesar biayanya atau memperkecil *expected value* dari tindak kejahatan. Oleh karenanya, kebijakan publik dan usaha swasta diarahkan untuk memperbesar biaya atas tindak kejahatan properti tersebut dengan memperbesar probabilita tertangkap, penenaan hukuman penjara, denda, dll.

⁴Glaeser, Edward L.; Bruce Sacerdote; José A. Scheinkman, *Crime and Social Interactions* [The Quarterly Journal of Economics, (1996)] Vol. 111, No. 2. pp. 507-548. 1996

Namun, kebijakan publik dan usaha swasta tersebut membutuhkan anggaran biaya yang tidak sedikit, dan dapat dialihkan untuk sektor lain selain pengurangan tindak kejahatan. Dengan kata lain, sumber daya yang tersedia untuk meminimumkan kejahatan properti bersifat langka dan terbatas. Oleh karenanya, sumber daya tersebut harus dioptimalkan sebaik-baiknya agar tercapai tingkat kejahatan properti yang serendah-rendahnya (Becker, 1968).

Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi, sumber daya yang terbatas harus digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan tingkat utilitas atau profit yang maksimum. Dengan kata lain, sumber daya untuk mengatasi permasalahan kejahatan properti, yang dimiliki oleh pihak swasta dan pemerintah daerah di Jawa, harus dioptimalkan untuk menurunkan tingkat kejahatan ke tingkat serendah-rendahnya. Salah satu caranya adalah dengan memberikan perhatian dan tindakan lebih (anggaran, dll) kepada variabel-variabel yang mempengaruhi permasalahan kejahatan properti secara signifikan.

Ekonomi kejahatan properti berusaha mengembangkan model ekonomi, lalu menggunakan model tersebut untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di suatu daerah. Dari situ bisa didapatkan respon kebijakan yang tepat untuk memerangi kejahatan properti di suatu daerah. Sebagai contoh, pada tahun 1972, John P. Allison menemukan bahwa setidaknya terdapat enam variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Chicago. Keenam variabel tersebut adalah tingkat pengangguran, proporsi populasi pria di sebuah komunitas, pengeluaran komunitas untuk rekreasi taman, rata-rata lama bersekolah populasi komunitas tersebut, proporsi populasi berumur 15-24 di sebuah komunitas, dan jarak antara komunitas dengan pusat kota.

Hasil penelitian Allison berperan penting dalam menghasilkan kebijakan publik dan usaha swasta yang lebih efektif untuk menanggulangi kejahatan properti di Chicago. Publikasi hasil penelitian tersebut dapat memberitahu pemerintah kota dan pihak swasta di Chicago untuk memperhatikan (memberikan prioritas anggaran dan tindakan lainnya) keenam variabel yang signifikan mempengaruhi tindak kejahatan di Chicago.

Dengan ini, sumber daya langka-terbatas yang dimiliki oleh pemerintah dan pihak swasta Chicago dapat digunakan secara optimal untuk meminimumkan tingkat kejahatan properti, dengan fokus mengendalikan keenam variabel tersebut. Atau, Chicago dapat melakukan respon yang baik pada penanggulangan kejahatannya apabila terjadi perubahan pada variabel-variabel tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu perintis bagi penelitian-penelitian yang serupa untuk daerah Jawa.

1.2. Perumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini adalah:

- a. Variabel-variabel ekonomi dan demografi apa saja yang mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Jawa?
- b. Seberapa besar tingkat signifikansi variabel-variabel tersebut dalam mempengaruhi tingkat kejahatan properti ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kejahatan properti di Jawa melalui pendekatan ekonomi. Dengan demikian akan didapatkan variabel-variabel yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Jawa.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis, sampai saat ini, belum ada penelitian yang melakukan pendekatan ekonomi dalam menganalisis tingkat kejahatan properti di Jawa. Permasalahan kejahatan properti, selama ini, hanya diteliti melalui pendekatan-pendekatan kriminologi dengan sebagian besar mengabaikan pengaruh variabel-variabel ekonomi.

Penelitian masalah kejahatan properti di Jawa melalui pendekatan ekonomi diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi pihak-pihak yang mempunyai perhatian terhadap masalah kejahatan properti. Dengan teridentifikasinya variabel-

variabel ekonomi dan demografis yang secara signifikan mempengaruhi tingkat kejahatan properti di Jawa, beserta tingkat signifikansinya, diharapkan pihak-pihak tersebut mendapatkan masukan dalam membuat kebijakan untuk menangani masalah kejahatan properti. Dengan berkurangnya masalah kejahatan properti di Jawa diharapkan penduduk Jawa akan memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi.

1.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

1. **Hipotesis Pertama:** seluruh variabel independen dalam model secara serentak signifikan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
2. **Hipotesis Kedua:** daerah kota atau bukan kota berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
3. **Hipotesis Ketiga:** pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
4. **Hipotesis Keempat:** tingkat kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
5. **Hipotesis Kelima:** tingkat pengangguran berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
6. **Hipotesis Keenam:** proporsi pria dengan usia 15 – 29 tahun berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
7. **Hipotesis Ketujuh:** proporsi keluarga *single mother* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.
8. **Hipotesis Kedelapan:** kekuatan kepolisian secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kejahatan properti di Jawa.

1.6. Pendekatan Model dan Data

Model yang digunakan sebagai dasar studi ini yaitu model yang diadopsi dari Doyle, Ahmed & Horn (1999), yaitu:

$$\ln PCRIME_{it} = \beta_1 \ln WAGE_{it} + \beta_2 \ln GINI_{it} + \beta_3 \ln YMEN + \beta_4 \ln PAP_{it} + \beta_5 \ln POLICE_{it} + \epsilon_{it}$$

Di mana PCRIME yaitu *per capita* kejahatan properti, sedangkan $WAGE_{it}$ diperoleh dari

$$WAGE_{it} = (1 - UR_{it})SAL_{it} + UR_{it}UCOMP_{it}$$

SAL = rata-rata upah real tahunan per pekerja

UR = tingkat pengangguran

UCOMP = rata-rata kompensasi riil per pengangguran

GINI = koefisien gini

YMEN = persentase penduduk pria usia 15 – 29 tahun dalam populasi

PAP = peluang pelaku kejahatan properti ditangkap

POLICE = jumlah polisi yang bertugas per kapita

Modifikasi model yang dilakukan oleh penulis menghasilkan model penelitian sebagai berikut:

$$PCrime = (\beta_1 CTY + \beta_2 SAL_i + \beta_3 POVi + \beta_4 UR_i + \beta_5 YMEN_i + \beta_6 SING_i + \beta_7 POL_i) + \alpha_i + v_i$$

Di mana:

PCrime = tingkat kejahatan properti di suatu daerah kabupaten/kota, didapat dari penduduk terkena tindak kejahatan properti per total penduduk.

CTY = variabel *dummy*, dimana kota = 1, bukan kota = 0.

SAL_i = upah rata-rata per bulan pekerja di kabupaten/kota i.

POVi = tingkat kemiskinan di kabupaten/kota i.

UR_i = tingkat pengangguran di kabupaten/kota i.

YMEN_i = proporsi pria usia 15-29 tahun dalam populasi penduduk di kabupaten/kota i.

- SING_i = proporsi keluarga *single mother* di kabupaten/kota *i*, dibuat diskret di mana daerah dengan tingkat keluarga *single mother* yang rendah = 0, dan daerah dengan tingkat keluarga *single mother* yang tinggi = 1.
- POL_i = jumlah polisi yang bertugas per 10 ribu penduduk kabupaten/kota *i*

I.7. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan studi ini dibagi menjadi lima bab, dengan urutan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, signifikansi dan manfaat studi, hipotesis, pendekatan model dan data, serta sistematika penulisan.
2. BAB II EKONOMI KEJAHATAN PROPERTI, menjelaskan teori, hasil penelitian yang menjadi dasar dari studi ini, serta kerangka teori yang akan digunakan dalam studi ini.
3. BAB III METODE PENELITIAN, mendeskripsikan dasar berpikir, pendekatan model, estimasi, serta data yang digunakan.
4. BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS, menjelaskan hasil yang didapatkan dari proses estimasi yang dilakukan.
5. BAB V KESIMPULAN, menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan serta memberikan saran-saran kebijakan di masa yang akan datang.